

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SURAT PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) DALAM PERKARA TIDAK

FRITS GERALD KAYUKATUI

ABSTRAK

Penyidikan merupakan suatu tahap terpenting dalam kerangka hukum acara pidana di Indonesia, karena dalam tahap ini pihak penyidik berupaya mengungkapkan fakta-fakta dan bukti-bukti atas terjadinya suatu tindak pidana serta menemukan tersangka pelaku tindak pidana tersebut. Dikeluarkannya Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau yang sering disingkat SP3 selalu menjadi bahan tuduhan dari masyarakat bahwa penegak hukum tidak serius dalam menyelesaikan berbagai kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini. Di mata masyarakat yang menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi diproses secara hukum dan dikenai hukuman yang seadil-adilnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimanakah proses di keluarkannya surat penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi? 2. Bagaimanakah terhadap putusan hakim yang memerintahkan untuk penghentian penyidikan? Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis proses di keluarkannya surat penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi. 2. Untuk menganalisis terhadap putusan hakim yang memerintahkan untuk penghentian penyidikan. Teori yang digunakan adalah teori penegakkan hukum dan teori kewenangan, dengan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan studi kasus diketahui bahwa 1. Proses di keluarkannya surat penghentian penyidikan (SP3) dalam perkara tindak pidana korupsi dimulai pada saat dilakukan proses penyelidikan oleh penyidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi. Dalam Pasal 1 angka (2 dan 5) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan pengertian tentang penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan tindak pidana merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 2. Putusan hakim yang memerintahkan untuk penghentian penyidikan dapat dilakukan dengan pengajuan permohonan praperadilan. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dapat diajukan sebagai objek gugat-praperadilan ke pengadilan, dimana pihak lembaga penyidik (dalam hal ini Kepolisian bila dihentikan ketika masih dalam tahap penyidikan/penyelidikan, ataupun Kejaksaan bila dihentikan saat memasuki tahap penuntutan) dijadikan sebagai pihak Termohon Preperadilan, dengan tujuan agar hakim menyatakan bahwa SP3 tidak sah, dan sekaligus memerintahkan agar pihak penyidik meneruskan proses penyidikan.

**JURIDICAL REVIEW ON LETTER OF TERMINATION OF
INVESTIGATION (SP3) IN CASE OF NON-CRIMINAL
CORRUPTION**

FRITS GERALD KAYUKATUI

ABSTRACT

Investigation is the most important stage in the criminal procedural law framework in Indonesia, because in this stage the investigator seeks to disclose the facts and evidence of a crime and find the suspect of the perpetrator of the crime. The issuance of a Termination of Investigation Letter or frequently abbreviated as SP3 has always been a matter of accusation from the public that law enforcement is not serious in solving various cases of corruption in the country. In the eyes of the people who wish that the perpetrators of corruption are prosecuted and punished as fairly as possible. The problems in this research are 1. How is the process of issuing letter of termination of investigation (SP3) in corruption crime case? 2. What about the decision of the judge ordering to terminate the investigation? The purpose of this study is 1. To analyze the process in issuing a letter of discontinuation of investigation (SP3) in the case of corruption. 2. To analyze the decision of the judge ordering to terminate the investigation. The theory used is the theory of law enforcement and authority theory, with the method of normative juridical research with case study approach known that 1. The process of issuing the letter of discontinuation of investigation (SP3) in corruption crime cases started at the time of investigation by the investigator on a case of action the criminal happens. In Article 1 number (2 and 5) of Law Number 8 Year 1981 regarding Criminal Procedure Code mentioned the definition of investigation and investigation. The investigation of a crime constitutes a series of investigative actions in respect of and in the manner prescribed by law to seek and collect evidence, which with such evidence makes light of the criminal offense and to find the suspect. 2. The judge's decision ordering for the suspension of an investigation may be made with a pre-trial petition. The Termination of Investigation Orders (SP3) may be filed as a pretrial object to the court, where the investigating agency (in this case the Police if terminated during investigation or prosecutor's office if terminated upon entering the prosecution stage) is designated as the Respondent's side , with the aim that the judge shall declare that the SP3 is invalid, and at the same time order the investigator to proceed with the investigation process.